

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk menjadi sekolah inklusif SMP N 5 Padang Panjang mempunyai beberapa kebijakan, yang di buat langsung oleh pihak sekolah, guru-guru termasuk guru pendamping ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Diantaranya yang pertama, adalah pembelajaran individual. Kedua adalah literasi, dan Ketiga yaitu, anti *bullying* adalah bentuk perlindungan pihak sekolah terhadap ABK.
2. Dalam implementasi kebijakan di SMP N 5 Padang Panjang melibatkan semua pihak sekolah seperti yang pertama, pembelajaran individual yang dalam proses pelaksanaannya melibatkan guru mata pelajaran, walikelas, guru pendamping ABK dan ABK itu sendiri. Kedua literasi, dalam proses pelaksanaannya tempat dan waktu disamakan dengan siswa reguler, yang membedakan hanya jika dalam siswa reguler di bagi dalam satu kelas yang berbeda-beda sesuai dengan bakat dan minat dengan nama pengembangan diri, sedangkan dalam literasi siswa ABK yang memiliki bakat dan minat langsung di bimbing oleh satu guru langsung sesuai dengan bakat dan minat dan juga di dampingi oleh guru pendamping ABK. Ketiga, anti *bullying* dalam pelaksanaannya langsung melibatkan siswa reguler yang disini adalah OSIS. Waktu pelaksanaannya yaitu disetiap hari mulai dari pembelajaran dimulai sampai waktu pembelajaran selesai.
3. Sebagai sekolah inklusif SMP N 5 Padang Panjang mendapatkan kendala-kendala dalam prosesnya, seperti masih kurangnya pemahaman dari sekolah dan guru-guru mengenai dasar pengetahuan pendidikan inklusif, sarana prasarana sekolah yang masih kurang mendukung untuk pendidikan inklusif, kurangnya tenaga pendidik untuk ABK atau yang disebut guru pendamping ABK yang seharusnya satu guru pendamping untuk

satu ABK, masih kurangnya mendapatkan pelatihan pendidikan inklusif dari dinas pendidikan (SMP N 5 Padang Panjang hanya mendapatkan satu kali dalam setahun), dan yang terakhir yaitu masih banyaknya kasus *bullying* yang terjadi terhadap ABK di SMP N 5 Padang panjang.

4.2 Saran

1. Sebaiknya sekolah bekerjasama dalam membuat kebijakan mengenai pendidikan inklusif dengan dinas pendidikan kota Padang Panjang. Karena dengan diketahui oleh dinas pendidikan, akan lebih memudahkan dalam proses pelaksanaannya dan adanya dasar yang kuat dalam proses pelaksanaannya. Dan dengan diketahui oleh dinas pendidikan kota Padang Panjang akan memudahkan SMP N 5 Padang Panjang untuk mendapatkan bantuan baik itu untuk sekolah, guru dan bahkan untuk ABK.
2. Sebaiknya SMP N 5 Padang Panjang tidak hanya menunggu pelatihan dari dinas pendidikan kota Padang Panjang, akan lebih baik jika SMP N 5 Padang Panjang berinisiatif untuk mendapatkan pelatihan sendiri dengan mengundang langsung narasumber. Agar proses pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP N 5 Padang Panjang menjadi lebih baik lagi.
3. Diharapkan SMP N 5 Padang Panjang lebih aktif lagi dalam memberikan masukan kepada dinas pendidikan kota Panjang Panjang mengenai pengajuan untuk mendapatkan bantuan sarana prasarana sekolah untuk pendidikan inklusif, bantuan untuk ABK hingga bantuan guru pendamping untuk ABK.
4. Untuk dinas Pendidikan kota Padang Panjang, juga diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam memperhatikan sekolah-sekolah yang mengusung pendidikan inklusif yang salah satunya yaitu SMP N 5 Padang Panjang.

